

KEADILAN SOSIAL DALAM TANTANGAN EKONOMI PASAR

Mencermati Gagasan Keadilan Sosial Hayek

Andre Ata Ujan

Abstract

Is social justice or economic justice a utopia? This would be one of the questions that anyone might immediately raise as he/she reads Friedrich August von Hayek's position on the idea of social or economic justice. As a classic liberal thinker, Hayek believed that the free market is the ideal economic system for it in nature promotes freedom and equality in a free and open society. Is Hayek's defence of the free market economy sufficiently convincing to eliminate any room for social or economic justice to take place? There is actually no free market in a pure sense. The market is not totally free from selfish interests that might be developed by market players themselves in doing business. It is therefore not reasonable to see the market as a purely spontaneous and independent entity. And since it is in fact open to selfish interventions, its outcomes may be just or unjust. Free competition, prompted systematically by the free market system, therefore, could risk human life. For this reason, state intervention to a certain extent is necessary to prevent market competition from endangering citizens' economic prospects. The state's intervention is important, as it is necessary, to secure social or economic justice. Social or economic justice is of course an ideal but not necessarily a utopia in a radical sense. Taking the unfortunates' quality of life as the benchmark in designing and enacting economic policies, social or economic justice might be, at least partially, realized. John Rawls' idea of maximin rule or maximin strategy can pave the way for the realization of such an ideal that every civilized person or society is essentially craving for.

Kata-kata Kunci: Kebebasan, pasar bebas, katalaksi, spontan, impersonal, hukum, keadilan sosial, ekonomi komando, regulasi, *maximin rule*.

Pendahuluan

Dari sudut etika, isu sentral dalam ekonomi adalah masalah keadilan sosial atau juga sering disebut keadilan ekonomi. Isu ini menjadi semakin penting bersamaan dengan praktik ekonomi pasar bebas yang dipercayai membuka peluang sebesar-besarnya bagi semua pelaku pasar tetapi sekaligus juga ditengarai menjadi penyebab semakin melebarnya jurang ketimpangan sosial ekonomi. Tanpa bermaksud mengabaikan sumbangan ekonomi pasar bebas, harus diakui bahwa pasar bebas telah memunculkan eksternalitas negatif yang kini semakin menjadi beban masyarakat negara-negara berkembang¹. Kekhawatiran itu semakin beralasan bersamaan dengan meluasnya pemujaan atas neoliberalisme yang “memaksa” semua aspek kehidupan manusia terperangkap dalam hegemoni ekonomi. Dengan demikian kebebasan (pasar) kini berwajah paradoks; di satu sisi, kebebasan menjadi prakondisi kemajuan, termasuk kemajuan ekonomi. Namun, di sisi lain, justru karena kebebasan ekonomi, disparitas sosial terus melebar. Dengan demikian, menciptakan keadilan sosial atau keadilan ekonomi merupakan tantangan serius. Akan tetapi pada titik urgensi ini Friedrich August von Hayek (1899-1992) justru berdiri berseberangan karena usaha ke arah itu menurutnya akan mengundang intervensi negara yang pada gilirannya mengancam kebebasan individu.

Keadilan sosial bagi Hayek tak lebih dari sebuah ilusi karena ekonomi pasar bebas dalam wataknya yang spontan dan independen tidak memberi ruang bagi keadilan sosial untuk dijadikan ukuran keberhasilan pasar. Pertanyaannya, apakah ekonomi pasar sungguh-sungguh menafikan peluang menegakkan keadilan sosial hanya karena upaya ke arah ini akan melanggar kebebasan?

Dalam tulisan ini saya ingin menunjukkan bahwa regulasi pasar, yang berarti pembatasan kebebasan ekonomi, tidak harus selalu dimaknai sebagai pelanggaran terhadap kebebasan. Karena itu, melalui regulasi yang cerdas upaya menciptakan kesejahteraan bersama selalu bisa dilakukan. Untuk itu, paper ini akan diawali dengan uraian singkat mengenai pandangan Hayek tentang keadilan sosial serta ekonomi pasar bebas. Sebuah catatan kritis akan melengkapi seluruh analisis ini untuk melihat kelebihan dan kekurangan gagasan Hayek tentang ekonomi pasar. Tulisan ini diakhiri dengan sebuah usul mengenai upaya menciptakan kesejahteraan sosial tanpa harus melanggar kebebasan.

¹ Bill Gates. “A New Approach to Capitalism” dalam Kinsley, Michael, (ed). *Creative Capitalism*. New York: Simon & Schuter, 2008, hlm.7-16.

Kebebasan, Kesejahteraan Umum, dan Hukum Abstrak

Hayek telah lama dikenal sebagai pembela ulung sistem pasar bebas *laissez faire*. Ia sekaligus juga dikenal karena kritik-kritiknya yang tajam berkaitan dengan intervensi terhadap pasar yang dilakukan dengan memaksakan pola-pola distribusi yang sengaja didesain demi pemerataan dan perimbangan kepemilikan atau kekayaan. Intervensi negara bagi Hayek selalu negatif karena menurutnya melanggar hak personal atas kebebasan dan bahkan menciptakan iklim politik otoritarian². Politik sentralisasi kebijakan dengan maksud mengendalikan pasar, demikian Hayek, akan mendorong kebijakan redistribusi kekayaan yang tidak adil karena muaranya justru menguntungkan mereka yang tidak berjasa dan sekaligus merugikan mereka yang bekerja keras. Redistribusi kekayaan hanya akan menguntungkan para *free riders*, sebuah egoisme ekonomi yang pasti bertentangan dengan prinsip keadilan dalam arti *fairness*³. Dengan kata lain, kesejahteraan umum tidak harus dicapai dengan distribusi kekayaan karena berpotensi melanggar keadilan. Pertanyaannya, bagaimana dengan mereka yang secara objektif tidak atau kurang beruntung (*the worst off*)? Apakah mereka harus dibiarkan dalam penderitaan hanya karena mereka tidak berkontribusi demi kebaikan bersama?

Terlepas dari catatan kritis tersebut, Hayek pada prinsipnya ingin menegaskan pentingnya memahami dan menciptakan kesejahteraan umum dengan tidak menjadikan pendapatan individu sebagai tujuan kebijakan ekonomi. Dalam sebuah masyarakat bebas (*Great Society* atau *Open Society*), penting dipahami bahwa kebaikan umum bukanlah akumulasi kesejahteraan individu. Kebaikan umum berurusan dengan bagaimana memfasilitasi pemenuhan tujuan-tujuan individu yang beragam dan tidak diketahui. Jelasnya, kebijakan negara tidak berurusan dengan pendapatan langsung individu melainkan dengan bagaimana menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap individu mengejar kepentingannya yang berbeda-beda.

Bagi Hayek, adalah tidak masuk akal berbicara tentang kesejahteraan individu sebagai sasaran langsung kebijakan pemerintah karena, *pertama*, sebetulnya tak seorang pun dapat mengetahui secara pasti atau memiliki pengetahuan lengkap (*fully informed*) yang menjadi prasyarat untuk menjamin pemenuhan kepuasan setiap orang. Bahkan dalam masyarakat modern pemenuhan kebutuhan setiap orang merupakan

² Friedrich August Hayek. *Law, Legislation and Liberty: The Mirage of Social Justice*. Chicago, London: The University of Chicago Press, 1978, hlm. 67-70.

³ Jhon Rawls. *A Theory of Justice*. Revised Edition. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 1999, hlm.52.

hasil dari suatu proses yang pemerintah pun tidak dapat mengetahuinya secara pasti. Dalam bahasa Adam Smith, pasar ditentukan oleh kekuatan *invisible hand*, sebuah mekanisme pasar berupa permintaan dan penawaran bebas yang memungkinkan transaksi pasar berlangsung tanpa seorang pun mampu menentukan hasil akhirnya secara pasti. Di dalam ketidak-pastian (*uncertainty*) seperti ini yang diperlukan adalah kondisi yang membuka peluang (*favorable opportunity*) bagi setiap orang untuk saling memenuhi kebutuhannya⁴.

Alasan *kedua*, dan ini yang paling penting, ketika tujuan individu atau kelompok menjadi sasaran pencapaian dari sebuah kebijakan publik (baca: kebijakan ekonomi), maka yang terjadi bukan harmoni melainkan konflik terbuka akibat kompetisi berbagai kepentingan yang sulit didamaikan. Itu wajar karena setiap kepentingan cenderung menuntut mendapatkan prioritas. Akibatnya, keadilan dan perdamaian yang menjadi tujuan masyarakat bebas tersingkir oleh perjuangan kepentingan individu atau kelompok. Untuk menghindari kemungkinan terjadinya konflik, yang perlu disepakati bukan tujuan melainkan alat atau cara bagaimana tujuan yang beragam dari individu-individu yang berbeda berpeluang direalisasikan. Masyarakat beradab, demikian Hayek, memang muncul dari kesadaran bahwa “manusia dapat hidup bersama dalam perdamaian dan saling menguntungkan tanpa harus menyepakati hal-hal tertentu yang menjadi tujuan masing-masing individu atau kelompok individu”⁵. Dengan ini, Hayek sesungguhnya memperkenalkan cara berpikir dan pendekatan *means-end* dalam ilmu ekonomi *mainstream* yang sekaligus membuka peluang untuk melihat ilmu ekonomi, meminjam istilah Amartya Sen, lebih sebagai ilmu rekayasa (baca: ilmu teknis kalkulatif) dari pada ilmu normatif. Dalam bahasa Karel Polanyi, ekonomi dipahami lebih sebagai ilmu *formal* daripada ilmu *substansif*⁶.

Dengan demikian Hayek menegaskan pentingnya kerja sama antar anggota masyarakat tanpa semua pihak harus tersandera dalam tujuan-tujuan individual yang belum tentu dapat diperdamaikan satu sama lain. Dengan cara ini Hayek, di satu pihak, memelihara kebebasan personal individu atau kelompok individu yang menurutnya penting karena merupakan fondasi peradaban manusia bebas. Namun, di lain

⁴ Hayek, *op.cit.*, 1976, hlm. 2 – 5; Bdk juga Rawls, *op.cit.*, 1999, hlm. 52-77.

⁵ *Ibid.*, hlm. 109.

⁶ Amartya, Sen. Judul asli: *Ethics and Economics*. Diindonesiakan oleh Rahmani Astuti: *Masih Adakah Harapan Bagi Kaum Miskin*. Bandung: Mizan, 1988, hlm.1-33. Bdk juga Karl Polanyi. *The Great Transformation. The Political and Economic Origins of Our Time*. Boston: Beacon Press. 1957, hlm.243-270.

pihak, dengan mengantisipasi kemungkinan konflik kepentingan, Hayek mengingatkan kita bahwa *self-interest* yang oleh ekonomi *mainstream* diterima sebagai refleksi rasionalitas perilaku aktual manusia dalam ekonomi⁷, berpotensi menjadi egoisme ekonomi yang justru mengancam kehidupan beradab masyarakat bebas. Dengan demikian, asumsi-asumsi moral yang diyakini Adam Smith mampu berfungsi sebagai *internal self-control* bagi individu berhadapan dengan kepentingan ekonomi, bagi Hayek rupanya tidak dapat diterima begitu saja sebagai tameng yang mencegah *self-interest* atau *self love* berubah menjadi egoisme (ekonomi) yang justru memicu konflik sosial.

Implikasinya dari sisi peraturan atau hukum adalah bahwa peraturan yang berlaku di dalam suatu masyarakat beradab (*Great Society*) tidak didesain untuk mencapai tujuan atau memberi manfaat yang sudah diperkirakan terlebih dahulu bagi individu atau kelompok orang tertentu melainkan sebagai instrumen untuk melayani kepentingan-kepentingan yang memang majemuk⁸. Itu sebabnya, sebuah peraturan yang baik harus bersifat umum dan abstrak. Dengan watak seperti itu, hukum membuka ruang bagi subjek untuk melakukan adaptasi-adaptasi dalam menghadapi ketidakpastian. Di sini pengalaman masa lalu dapat menjadi bekal untuk memprediksi kemungkinan situasi yang akan terjadi dan sekaligus mengingatkan pelaku akan pentingnya memperhatikan peraturan tertentu berhadapan dengan kemungkinan tersebut. Dengan demikian sebuah peraturan berfungsi hanya sebagai norma umum untuk mengejar kepentingan atau tujuan beragam dari individu-individu yang juga beragam⁹.

Hayek memang lebih menekankan utilitarianisme peraturan (*rule utilitarianism*) daripada utilitarisme tindakan (*act utilitarianism*). Peraturan berfungsi sebagai nilai yang mengarahkan perilaku individu. Peraturan tidak secara langsung menentukan jenis atau bentuk tindakan yang harus diambil melainkan memberi *insight* bagaimana individu seharusnya bertindak. Sementara utilitarianisme tindakan Bentham, menurut Hayek, tidak relevan karena penentuan tindakan mengandaikan pengetahuan tentang situasi konkrit tentang pelaku tindakan dan bagaimana efek tindakan baik bagi pelaku maupun bagi banyak orang lain. Tuntutan ini berlebihan, demikian Hayek, karena mengabaikan faktor ketidak-tahuan (*ignorance*) yang memang selalu menyertai proses pengambilan keputusan.

⁷ Amartya Sen, *op.cit.*, hlm. 13-15.

⁸ Hayek, *op.cit.*, hlm. 4-5.

⁹ *Ibid.*, hlm. 11-14 & 126 dst.

Karena fungsinya sebagai norma yang memberi arah itulah maka peraturan, demikian Hayek, sesungguhnya tidak diperlukan kalau saja manusia memiliki pengetahuan lengkap tentang situasi serta hasil atau efek dari tindakannya. Sayang, kondisi seperti ini tidak pernah ada. Bahkan, seperti sudah ditegaskan sebelumnya, dalam situasi ketidakpastian, apa yang disebut hasil dari tindakan sesungguhnya tidak tergantung semata-mata pada peraturan yang dijadikan pegangan melainkan juga ditentukan oleh kepandaian subjek untuk beradaptasi demi membuka peluang keberhasilannya. Itu sebabnya, sekali lagi, peraturan yang baik harus bersifat “generik” (*rule utilitarianism*) serta berjangka panjang (*long term*), bukan “partikularistik” (*act utilitarianism*) dan berjangka pendek (*short term*)¹⁰.

Ilusi Keadilan Sosial

Dengan alasan-alasan di atas, Hayek kemudian mempersoalkan keadilan sosial yang umum ingin diwujudkan melalui redistribusi kekayaan¹¹. Menjadikan keadilan sosial sebagai basis untuk menuntut dan mendesain redistribusi kekayaan, bagi Hayek, merupakan cara berpikir primitif, karena potensi manfaat atau ancaman yang bisa saja didapatkan siapa pun dalam mekanisme pasar pada gilirannya merupakan akibat yang tidak pernah dirancang secara sadar oleh siapa pun. Karenanya, pasar yang sebetulnya spontan itupun tidak dapat dikendalikan secara moral. Itu sebabnya bagi Hayek apa yang disebut keadilan sosial sesungguhnya tidak lain hanya merupakan konsekuensi langsung dari “antropomorfisme” atau “personifikasi” sebagai upaya untuk mempertanggung-jawabkan sebuah proses dan tatanan yang sejatinya bersifat *self-ordering*, yakni pasar. Hayek bahkan menyebut cara berpikir seperti itu sebagai tidak matang karena terus menuntut pemuasan (baca: keadilan sosial) dari sebuah proses (pasar) yang sebetulnya impersonal. Dengan kata lain, karena pasar tidak pernah dikendalikan, maka hasil apa pun yang diperoleh melalui mekanisme pasar tidak dapat disebut adil atau tidak adil.

Hal itulah yang menjadi alasan mengapa Hayek cenderung mencurigai gerakan-gerakan politik yang menjadikan keadilan sosial sebagai tema perjuangan. Para penganut liberalisme maupun sosialisme, menurut Hayek, berlomba menjadikan keadilan sosial sebagai ukuran perjuangan politik. Namun melihat mekanisme pasar serta hasilnya yang tak pernah bisa dikontrol, menjadi pertanyaan apakah gerakan-gerakan itu memang sungguh-sungguh bertujuan menegakkan keadilan sosial? Atau, jangan-

¹⁰ *Ibid.*, hl 20-23.

¹¹ *Ibid.*, hlm, 62-102.

jangan keadilan sosial hanya menjadi kamufase politik?

Hayek terus meragukan peluang terciptanya keadilan sosial karena, dalam observasinya, semakin cita-cita ini didengungkan, semakin ia tak berujud dalam kenyataan. Situasi sosial yang lebih adil sekurang-kurangnya masih tetap diragukan. Bahkan dengan mendorong keadilan sosial para pendukung liberalisme dan sosialisme, demikian Hayek, mengancam nilai-nilai dasar (baca: kebebasan) yang sesungguhnya penting untuk peradaban manusia¹². Di sini terlihat Hayek mencampuradukan keadilan sosial sebagai sebuah nilai (ideal) dengan perwujudannya dalam situasi politik dan ekonomi konkrit. Menjadi pertanyaan, apakah karena perwujudannya masih jauh dari konsep idealnya (baca: tidak sempurana) lalu harus disimpulkan bahwa keadilan sosial hanyalah sebuah ilusi? Obsesinya membela pasar bebas, di satu pihak, dan menolak keadilan sosial untuk mencegah intervensi negara, di lain pihak, telah membuat Hayek terjebak dalam *natural fallacy*—sebuah kesesatan berpikir di mana sebuah ideal dibuang hanya karena *praxis* hidup tak seirama dengannya.

Akan tetapi mengikuti jalan pikiran Hayek harus dikatakan bahwa diskusi tentang tegangan antara keadilan sosial sebagai sebuah ideal dan perwujudan konkritnya dalam ekonomi tidak bermakna apa pun karena keadilan sosial memang tidak punya tempat dalam masyarakat bebas. Dan seperti banyak upaya yang dilakukan untuk mengejar hal-hal ideal (yang tak pernah dapat diraih sepenuhnya), demikian juga usaha untuk menegakkan keadilan sosial hanya akan berujung pada akibat-akibat yang tidak diinginkan. Secara khusus, gerakan sosialisme hanya akan mengakibatkan hancurnya iklim yang secara tradisional subur untuk berkembangnya nilai-nilai moral, yakni kebebasan personal. Karena itu juga, gagasan keadilan sosial menurut Hayek tidak cocok dengan watak dasar pasar bebas yang memang sangat menekankan kebebasan personal. Pertanyaan penting yang muncul kemudian adalah apakah tatanan pasar dapat dipertahankan ketika atas nama keadilan sosial penguasa memaksakan pola-pola remunerasi yang didasarkan pada penilaian kinerja atau kebutuhan yang berbeda-beda¹³?

Dengan tegas Hayek menjawab “tidak”, meskipun ia mengakui adanya keyakinan umum bahwa konsep keadilan sosial tetap valid dan karenanya masyarakat terus termotivasi untuk mewujudkannya melalui campur tangan pemerintah. Namun Hayek mengingatkan, semakin individu atau kelompok individu tergantung pada pemerintah semakin

¹² *Ibid.*, hlm.65-67.

¹³ *Ibid.*, hlm.67-70.

kuat pula tuntutan mereka agar pemerintah mengusahakan berbagai pola untuk mewujudkan distribusi yang adil (baca: keadilan distributif). Dan semakin pemerintah berusaha mewujudkan keinginan mereka, semakin mereka mau tidak mau tunduk di bawah kontrol pemerintah. Proses politik seperti ini, demikian Hayek, hanya akan menyuburkan totalitarianisme.

Ketergantungan pada pemerintah ini mudah dipahami karena adanya pengalaman bahwa keadilan sosial praktis sulit direalisasikan. Akan tetapi ketergantungan itu juga sesungguhnya, menurut Hayek, berangkat dari pandangan keliru bahwa proses pasar dan hasilnya dapat direncanakan dan diketahui secara pasti. Kalau proses dan hasilnya dapat direncanakan maka jelas pula siapa yang seharusnya dipersalahkan ketika jurang antara yang kaya dan miskin terus melebar. Persoalannya, demikian Hayek, dalam tatanan pasar yang sifatnya spontan, tak seorang pun dapat memastikan siapa yang sesungguhnya bertanggung jawab terhadap kemalangan yang diderita sebagian anggota masyarakat dan karenanya juga *absurd* untuk mengatakan telah terjadi ketidak-adilan. Kita memang cenderung memrotas nasib tak menguntungkan yang menimpa sebagian anggota masyarakat, padahal dalam pasar bebas kita sebenarnya tidak tahu persis siapa yang harus dipersalahkan. Kontrol yang tegas, dan dengan demikian pihak yang dapat ditunjuk sebagai yang bertanggung jawab atas eksternalitas negatif pasar, hanya bisa ditemukan di dalam sistem ekonomi komando. Di sini pasar dijalankan dengan tujuan-tujuan tertentu yang sudah direncanakan sebelumnya dan karenanya hasilnya dapat disebut adil atau tidak adil. Namun sistem ini bertentangan dengan etos masyarakat bebas karena ia mengampusti kreativitas dan inisiatif individu yang justru penting untuk kemajuan ekonomi. Dalam bahasa Hayek, sistem ekonomi komando mengancam kebebasan yang menjadi sendi peradaban masyarakat beradab.

Pasar: Sebuah Permainan/Katalaksi

Dengan uraian di atas Hayek hendak menegaskan bahwa hanya perilaku individu yang dapat disebut adil atau tidak adil; sedangkan apa pun muncul sebagai hasil dari sistem ekonomi pasar tak dapat disebut adil atau tidak adil. Kata Hayek, "Karena hanya situasi yang diciptakan oleh manusia yang dapat disebut adil atau tidak adil, maka hasil partikular apa pun dari sebuah tatanan spontan tak dapat disebut adil"¹⁴. Tegasnya, keadilan merupakan atribut atau sifat tindakan manusia yang dilakukan secara sadar dan karenanya tidak berlaku bagi situasi yang terjadi di luar rencana manusia. Keadilan, demikian Hayek, menuntut

¹⁴ *Ibid.*, hlm.33.

bahwa dalam perlakuan terhadap orang lain, yakni dalam tindakan yang membawa akibat bagi kesejahteraan orang lain, diperlukan peraturan tertentu. Tetapi tuntutan seperti ini tidak dapat diterapkan pada sistem ekonomi karena seluruh proses distribusi barang dan jasa dikendalikan oleh pasar yang sifatnya impersonal. Proses impersonal seperti ini tidak dapat disebut adil atau tidak adil. Tegasnya, meskipun perilaku individu (dalam pasar) bisa saja adil atau tidak adil, namun karena konsekwensinya bagi orang lain tidak pernah direncanakan atau diprediksi oleh siapa pun, maka akibat tindakan juga tidak bisa disebut adil atau tidak adil.

Hayek melihat pasar tak lebih dari sebuah permainan. Seperti halnya dalam permainan diperlukan aturan main, demikian juga dalam ekonomi. Peraturan dibuat dan disepakati karena dipercayai mampu meningkatkan peluang bagi siapa pun untuk mendapatkan manfaat dari permainan. Akan tetapi perlu dicatat bahwa adanya peraturan sekaligus menjadi indikasi bahwa permainan tidak seluruhnya dapat dikontrol oleh individu atau kelompok individu. Karenanya, hasil permainan pun tidak dapat diprediksi apalagi dipastikan oleh siapa pun sejak awal. Lebih dari itu, di dalam setiap permainan, peraturan hanyalah salah satu unsur yang membuka peluang keberhasilan. Selain peraturan, masih dibutuhkan pengetahuan dan ketrampilan, bahkan keberuntungan, yang memungkinkan individu mendapatkan hasil maksimal dari permainan. Dan karena pengetahuan serta ketrampilan berbeda bagi setiap orang maka meskipun bermain dengan panduan peraturan yang sama, tak ada jaminan apa pun bahwa semua pihak akan mendapatkan hasil yang sama. Paling-paling permainan disebut *fair* karena berlangsung dengan aturan main yang sama. Prinsipnya, setiap pemain tidak boleh berlaku curang. Akan tetapi tidak masuk akal, demikian Hayek, mengatakan bahwa hasil bagi setiap orang harus adil. Hal yang sama juga terjadi dalam ekonomi.

Karena itu Hayek juga menyebut sistem ekonomi pasar bebas sebagai sebuah *cattalaxy*,¹⁵ yakni sebuah fenomena berupa tatanan spontan khusus yang dihasilkan melalui tindakan para pelaku pasar yang, di satu pihak, mematuhi aturan main yang sama, namun, di lain pihak, terus berusaha melakukan penyesuaian timbal-balik untuk mencapai kepentingan masing-masing. Yang istimewa dari sebuah katalaksi adalah bahwa sistem ini mampu mendamaikan pengetahuan dan tujuan-tujuan berbeda. Di dalam katalaksi, setiap orang mengejar kepentingannya sendiri tanpa harus menutup peluang bagi pihak lain untuk memenuhi

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 108.

kepentingannya sendiri pula. Terlihat di sini betapa Hayek meyakini bahwa pasar dengan *self-interest* yang mengendalikannya tidak akan menjadi medan yang menyuburkan egoisme ekonomi. Dengan demikian, Hayek mengakui adanya semacam *enlightened self-interest* dalam kompetisi ekonomi sehingga pasar tetap memberi peluang bagi setiap orang untuk memenuhi kebutuhannya (meskipun, di lain pihak, sebagaimana dijelaskan sebelumnya, Hayek juga menyadari potensi konflik yang terkandung di dalam *self-interest* sebagai motif ekonomi).

Itu sebabnya Hayek percaya bahwa sebagai sebuah katalaksi, pasar merupakan sistem yang paling efisien karena di sana semua pihak dapat memperoleh keuntungan. Dalam bahasa ekonomi kalkulatif, pasar bebas pantas didukung karena hanya dalam sistem itu “optimalitas pareto” (*pareto optimality*) terpenuhi¹⁶. Dari sudut manfaat ekonomi, *optimalitas pareto* dianggap terpenuhi jika dan hanya jika tidak ada manfaat ekonomi seseorang atau kelompok orang dapat ditingkatkan tanpa mengurangi manfaat yang sama bagi orang lain. Menjadi pertanyaan, apakah dengan terpenuhinya *optimalitas pareto* lalu harus disimpulkan bahwa hak setiap orang dengan sendirinya juga terpenuhi? Dengan kata lain, meskipun akan ditolak oleh Hayek, apakah keadilan dengan sendirinya terpenuhi dengan terwujudnya *optimalitas pareto*?

Menurut Hayek, tatanan pasar tidak mendapatkan basisnya pada kepercayaan bahwa pasar didukung karena mampu menciptakan keadilan sosial—dalam arti, setiap orang mendapatkan apa yang menjadi haknya sesuai dengan jasa yang diberikannya. Pasar, demikian Hayek, tidak berkembang dengan cara berpikir demikian. Pasar mengajarkan bahwa harga ditentukan oleh perilaku yang adil di dalam pasar, yakni harga kompetitif yang diperoleh tanpa kecurangan, monopoli, dan kekerasan. Itulah yang dituntut oleh keadilan. Konsep keadilan liberal yang diperkenalkan John Locke, menurut Hayek, justru berangkat dari gagasan kompetisi bebas seperti itu. Hanya cara berkompetisi yang dapat disebut adil atau tidak adil; sedangkan hasilnya tidak dapat disebut adil atau tidak adil. Dengan demikian peraturan umum tentang prosedur pasar tidak dapat menjamin imbalan yang diperoleh dalam pasar. Dan pasar, demikian Hayek, memang tidak mendapatkan pembenaran dirinya melalui imbalan atau manfaat ekonomi yang dinikmati.

Mencermati Keadilan Sosial Hayek

Posisi Hayek berkaitan dengan keadilan sosial bertolak dari pandangannya tentang sistem ekonomi pasar bebas. Baginya, pasar bebas sebagai sebagai ordo spontan impersonal, di satu sisi, beroperasi

¹⁶ Amartya Sen, *op.cit.*, hlm. 27.

dengan aturan main tertentu, namun, di sisi lain, keberlangsungan pasar bebas serta manfaat yang dijanjikan pasar sangat tergantung dari kepiawaian para pelakunya untuk beradaptasi serta melakukan terobosan-terobosan untuk memperbesar peluang keberhasilannya masing-masing pihak. Bahkan lebih daripada itu, keberhasilan para pelaku pasar ikut ditentukan oleh faktor keberuntungan. Karena sifatnya yang demikian maka bagi Hayek tidak masuk akal menuntut keadilan sosial berkaitan dengan hasil pasar. Bahkan tuntutan ini secara moral, demikian Hayek, menjadi semakin problematis ketika pasar sengaja diintervensi melalui kebijakan redistribusi kekayaan oleh negara guna mewujudkan keadilan sosial. Intervensi oleh negara tidak hanya akan mengancam kebebasan, yang oleh Hayek dilihat sebagai fondasi peradaban, melainkan juga akan menciptakan ketidak-adilan karena kebijakan seperti itu akan mengutungkan mereka yang “malas” dan merugikan mereka yang bekerja keras.

Penolakan Hayek terhadap intervensi negara juga bertolak dari keyakinannya bahwa pasar bebas justru menjadi tatanan sosial paling efisien bagi setiap individu untuk mengejar kepentingannya. Dengan memberi ruang kebebasan sebesar-besarnya pada setiap individu, pasar dipercayai mampu mewujudkan *optimalitas pareto*.

Beberapa hal perlu dicatat di sini. *Pertama*, apa jaminannya bahwa ruang kebebasan yang diciptakan oleh hukum umum dan abstrak tidak akan disalah-gunakan oleh pelaku pasar? Kalau peluang penyalah-gunaan peraturan terbuka, lalu mengapa hasil dari pasar sebagai akibat penyalah-gunaan peraturan tidak dapat disebut tidak adil? Hayek rupanya lupa bahwa peraturan seberapa pun umumnya tidak mampu mengantisipasi semua problem yang potensial muncul di masa mendatang. Sifat peraturan yang umum dan abstrak memang membuka peluang lebih besar dalam penerapannya, tetapi dari situ tidak dapat disimpulkan bahwa sifat fleksibel peraturan juga sekaligus membuatnya lebih efektif dari sisi operasional. Tidak ada hukum atau peraturan yang begitu komprehensif dari segi substansi sehingga tak ada celah apa pun yang membuat problem apa pun luput dari pengaturannya. Hukum selalu terbatas dan karenanya tidak sepenuhnya antisipatif¹⁷. Di sini pertimbangan moral menjadi penting. Selain daripada itu, meskipun ada benarnya, hukum yang terlalu umum juga berpotensi membuka ruang inrterpretasi begitu longgar sehingga peluang penyalah-gunaannya pun menjadi lebih terbuka. Kalau demikian kenyataannya, alasan Hayek bahwa pasar seluruhnya beroperasi secara spontan independen dan

¹⁷ R. Boatright. *Ethics and The Conduct of Business*. Fourth Edition. New Jersey: Pearson Education, Inc. 2003, hlm. 16-18.

karenanya hasilnya tidak dapat disebut adil atau tidak adil, tidak dapat sepenuhnya diterima.

Perlu dicatat bahwa kehadiran hukum selalu beerifat paradoks. Menjadi watak peraturan bahwa kehadirannya, di satu sisi, membatasi ruang gerak, namun, di sisi lain, ia sekaligus membuka peluang. Dalam kultur hukum positivistik, cenderung berlaku adagium: “Apa saja boleh sejauh tidak ilegal”. *Loophole seeking mentality* seperti ini cukup umum dan karenanya tidak mustahil bahwa “atas-nama-hukum” pelaku pasar merasa sah melakukan apa saja untuk memenangkan kepentingannya sejauh tidak ilegal. Lebih buruk daripada itu, para pencari celah hukum cenderung berpikir “*what is legally alright must be morally alright too*”. Dalam bingkai cara berpikir seperti ini, tidak bisa dikatakan bahwa apa yang terjadi di pasar seluruhnya bersifat spontan, di luar perencanaan siapapun. Karena itu, juga tidak dengan sendirinya tepat untuk menyimpulkan bahwa hasil pasar tidak dapat disebut adil atau tidak adil. Tegasnya, ketika ruang penyalah-gunaan peraturan terbuka, maka tidak ada cukup alasan untuk mengatakan pasar merupakan sebuah ordo sosial yang seluruhnya spontan impersonal dan karenanya hasil-hasilnya tidak dapat dipersoalkan dari segi keadilan.

Melepaskan hasil pasar dari penilaian moral justru memberi peluang untuk mengklaim hak atas sesuatu secara tidak legitim. Pemilikan atas suatu barang baru disebut legitim, kalau dan hanya kalau merupakan hasil transaksi bebas dan diperoleh dari pihak lain yang kepemilikannya atas barang atau jasa dipertransaksikan juga legitim. Di dalam pasar bebas dengan peraturan-peraturan umum yang mudah disalah-gunakan oleh siapa pun, suatu transaksi bebas bisa saja terjadi. Tetapi klaim atas kepemilikan menjadi tidak legitim ketika transaksi itu terjadi di antara para pelaku yang klaim kepemilikan atau haknya atas barang sesungguhnya tidak legitim. *Entitlement Theory* mengatakan bahwa hak legitim seseorang atas barang dengan sendirinya gugur ketika barang tersebut diperoleh dari pihak yang tidak memiliki hak legitim atas barang yang bersangkutan¹⁸.

Kedua, agak aneh bahwa intervensi negara cenderung dipahami sebagai pelanggaran terhadap kebebasan. Harus dibedakan antara pembatasan kebebasan dalam arti pengaturan (*regulation*) dan pembatasan kebebasan dalam arti pelanggaran (*infringement*) atas kebebasan. Pembatasan kebebasan dalam arti pelanggaran tentu saja harus ditolak. Hayek benar bahwa kebebasan adalah fondasi peradaban. Ekspresi diri, inovasi dan kreasi yang menjadi sendi-sendi moral operasional peradaban sangat

¹⁸ Robert Nozick. *Anarchy, State, and Utopia*. Oxford: Basic book, Inc.: 1974, hlm. 150-155.

tergantung pada ruang kebebasan yang dimiliki subjek. Pembatasan atas kebebasan dalam arti pengaturan perlu ditempatkan di dalam bingkai perkembangan peradaban itu sendiri. Pemujaan terhadap kebebasan tanpa pembatasan dalam arti pengaturan justru akan menjadi bumerang bagi manusia.

Pertimbangan seperti di atas telah membawa pemikir-pemikir seperti Thomas Hobbes (1588-1679), Jean-Jacques Rousseau (1712-1778), dan Immanuel Kant (1724-1804) memperkenalkan konsep “kontrak sosial” dalam penataan kehidupan politik. Terlepas dari eksternalitas negatif (*negative externality* atau *unintended negative effect*) yang cukup mendasar bagi hak-hak dasar warga negara, tuntutan Hobbes agar warga negara menyerahkan hak-haknya untuk sepenuhnya diatur oleh raja, sebetulnya berangkat dari motif awal pentingnya mengamankan hak-hak warga negara. Kant berpikir dengan logika moral politik yang sama meskipun dengan pemecahan atau jalan keluar yang berbeda. Daripada memberikan kekuasaan mutlak kepada raja sebagaimana diinginkan Hobbes, Kant dalam karyanya *The Metaphysical Elements of Justice* menekankan pentingnya hukum sebagai perangkat politik untuk melindungi hak-hak dasar warga negara. Demi perlindungan atas hak-hak dasar setiap orang, demikian Kant, di bawah bimbingan “rasio praktis” anggota masyarakat bersepakat untuk beralih dari *prejuridical society* ke *juridical society*¹⁹. Perlindungan terhadap hak bahkan begitu penting sehingga masyarakat, menurut Kant, dibenarkan untuk memaksa siapa saja agar beralih dari situasi masyarakat tanpa hukum ke dalam masyarakat di mana hak-hak dasarnya dijamin pelaksanaannya oleh hukum. Dengan demikian, klaim negara hukum mengandaikan pengakuan atas kedudukan esensial negara untuk menjaminn hak-hak dasar warganya melalui hukum. Karena itu, pembatasan dalam arti pengaturan oleh negara atas kebebasan justru perlu untuk melindungi hak-hak dasar setiap orang, termasuk hak atas kesejahteraan sosial. Di situ masalah hukum adil atau tidak adil menjadi krusial.

Ketiga, pembelaan Hayek terhadap pasar bebas karena alasan efisiensi atau karena terpenuhinya *optimalitas pareto* merupakan refleksi dari sebuah optimisme berlebihan terhadap kemampuan pasar bebas yang beroperasi dengan prinsip *self-ordering*. Optimisme seperti itu beralasan kalau pasar itu sendiri sempurna. Dalam kaitan ini perlu dicatat bahwa pasar hanya bekerja secara sempurna kalau didukung informasi yang lengkap. Ini suatu hal yang mustahil terjadi dalam pasar. Kompetisi di dalam pasar mengandaikan daya saing; dan itu berarti informasi

¹⁹ Immanuel Kant . *The Metaphysical Elements of Justice*. Translated with an introduction by John Ladd. Indianapolis, New York: The Bobs-Merrill Company Inc, 1965, hlm. 18-20.

tidak akan dibiarkan terbuka begitu saja. Kelangkaan informasi justru menjadi bagian dari strategi memenangkan pasar. Jadi tidak seluruhnya tepat bahwa pasar seluruhnya lepas dari kendali siapa pun. Karena itu juga, sekali lagi, posisi Hayek bahwa hasil pasar tidak bisa saja adil atau tidak adil juga tidak seluruhnya tepat.

Selain dari itu, efisiensi atau *optimalitas pareto* hanya dapat diterima sejauh ekonomi hanya berurusan dengan asas manfaat dan mengabaikan pemerataan manfaat²⁰. Fokus berlebihan pada asas manfaat menunjukkan bahwa ekonomi menjadi tujuan di dalam dirinya sendiri. Tak mengherankan kalau ekonomi kemudian lepas dari pertimbangan-pertimbangan non-ekonomi. Di sini, posisi Hayek berhadapan dengan dua kesulitan serius: (1) Hayek seakan percaya bahwa perilaku aktual ekonomi ditentukan semata-mata oleh motif ekonomi (*self-interest*); dan (2) Hayek mengabaikan teori keseimbangan umum formal dalam ekonomi.

Self interest diakui penting dalam mendorong kemajuan ekonomi. Namun tidak seluruhnya tepat menyimpulkan bahwa ekonomi menjadi satu-satunya motif kegiatan ekonomi. Atau, barangkali benar bahwa *self-interest* menjadi motif paling penting pada masa-masa awal sebuah pergulatan ekonomi. Tetapi pasti berlebihan bahwa itulah satu-satunya motif yang terus menjadi mesin penggerak prestasi ekonomi. Karl Polanyi dalam *master piece*-nya *The Great Transformation*, (2001), menyangkal asumsi itu. Melalui studi antropologis-historis mengenai perkembangan ekonomi, ia sampai pada kesimpulan bahwa motif non-ekonomi tak jarang lebih menentukan dibandingkan dengan motif ekonomi dalam kemajuan ekonomi. Tak sedikit prestasi ekonomi lahir sebagai hasil dari sebuah obsesi yang melampaui kepentingan ekonomi itu sendiri. Dalam skala mikro seorang ayah bisa saja bekerja keras bukan supaya ia menjadi sangat kaya tetapi terutama itulah jalan untuk menjaga kehormatan dan harga dirinya di mata keluarga.

Hal yang sama juga terjadi pada skala lebih luas. Raja microsoft Bill Gates di depan Forum Ekonomi Dunia di Davos, Swizerland, (Januari 2008), menegaskan pentingnya memperhatikan insentif non-ekonomi dalam bisnis. Katanya, *self-interest* memang merupakan insentif penting kapitalisme. Tetapi melihat eksternalitas negatif dari pasar, sudah seharusnya disadari akan pentingnya insentif alternatif yang juga berbasis pasar (*market-based incentive*), yakni pengakuan (*recognition*).²¹ Pasar seharusnya tidak dilihat semata-mata sebagai medan mengejar

²⁰ Amartya Sen, *op.cit.* hlm.27.

²¹ Gates, hlm.10.

keuntungan ekonomis. Melalui pasar, pelaku bisnis juga menciptakan citra positif untuk dirinya. Di sini Gates ingin menegaskan bahwa pelaku bisnis yang baik seharusnya menempatkan nilai hidupnya melampaui nilai ekonomi. Meskipun lekat dengan prestasi ekonomi, pengakuan atau *Self-image* positif merupakan sebuah *social value* atau *intangible value* yang bukan saja bermanfaat untuk keuntungan ekonomi jangka panjang, melainkan menjadi nilai fundamental dalam membentuk kualitas diri sebagai manusia. Dari sini *self-interest* lalu berkembang lebih luas menjadi *enlightened self-interest* di mana kemajuan ekonomi dikaitkan dengan tanggung jawab sosial.

Bukanlah hal yang mustahil bahwa motif religius ikut bekerja dalam prestasi ekonomis seseorang. Ketika kerja dan prestasi ekonomi dilihat sebagai bentuk pertanggung-jawaban atas talenta yang diberikan Tuhan, maka kekayaan (*economic gain*) hanyalah “motif antara” (*instrumental end*) untuk suatu tujuan yang lebih mulia dari pada kekayaan ekonomi. Sejarah praktik ekonomi ikut menegaskan kedudukan sentral motif non-ekonomi ini. Apa yang disebut merkantilisme, misalnya, justru lahir dari kesadaran akan pentingnya mempertahankan kedaulatan negara. Penguasaan ekonomi melalui perdagangan menjadi syarat mutlak untuk menunjukkan keunggulan dan kedaulatan negara di mata masyarakat dunia. Dengan demikian merkantilisme berkembang terutama di atas landasan atau motif non-ekonomi, yakni nasionalisme²².

Selain dari pada itu, penekanan pada motif ekonomi membuat Hayek mengabaikan apa yang oleh Amartya Sen disebut sebagai teori “keseimbangan umum” formal dalam ekonomi. Sederhananya, teori ini menekankan bahwa masalah ekonomi tidak dapat dipahami sepenuhnya melulu berdasarkan teori ekonomi itu sendiri. Ekonomi perlu membuka diri pada pertimbangan-pertimbangan di luar teori ekonomi agar masalah ekonomi dapat ditangani dengan baik. Kelaparan, misalnya, demikian Sen, dapat terjadi di tengah kelimpahan makanan. Di sini menjadi penting bagi ekonomi untuk membuka diri bagi pertimbangan-pertimbangan yang sifatnya non-ekonomis namun ikut memengaruhi dan bahkan tak jarang sangat menentukan kinerja ekonomi. Berkaitan dengan itu Sen secara khusus menyebut pentingnya pertimbangan etika dalam ekonomi, karena keyakinannya bahwa ekonomi justru menjadi lebih produktif ketika pertimbangan-pertimbangan etika dilibatkan dalam pengambilan keputusan ekonomi²³.

Keempat, tekanan pada pasar bebas dengan kompetisi bebas sebagai

²² Ian Bremmer. *The End of The Free Market. Who Wins the War Between States and Corporation?*. New York: Penguin Group (USA) Inc. 2010, hlm.32-42.

²³ Amartya.,hlm, 7-8..

watak dasarnya membuat ekonomi tercerabut dari sistem relasi sosial yang justru menjadi karakter orisinal ekonomi (*embedded economy*)²⁴. Studi antropologis-historis Polanyi memperlihatkan bahwa ekonomi secara alami tidak pernah menjadi tujuan dalam dirinya sendiri. Ekonomi selalu ditempatkan dalam sebuah relasi sistem nilai yang lebih luas demi kemanusiaan. Ekonomi bahkan menjadi alat kohesi sosial. Itu sebabnya, Polanyi mendapatkan bahwa nilai-nilai sosial seperti resiprositas dan redistribusi memainkan peran sentral dalam kemajuan dan perkembangan ekonomi. Dalam bahasa berbeda, kemajuan ekonomi ditentukan bukan terutama oleh tingkat pertumbuhan, melainkan oleh seberapa besar kontribusi substansialnya terhadap kesejahteraan bersama. Dengan demikian *pemerataan manfaat* dalam posisi orisinal ekonomi dipandang lebih utama daripada sekedar *pemenuhan* asas manfaat.

Betapa pun berharganya catatan-catatan kritis di atas, pasti tidak *fair* membahasakan Hayek secara hitam-putih. Beberapa hal dalam gagasannya mengenai keadilan ekonomi pantas digaribawahi. *Pertama*, penolakannya terhadap intervensi negara tetap punya sisi positif. Redistribusi kekayaan, di satu pihak, layak dilihat sebagai bentuk tanggung jawab negara terhadap warga negara. Namun, di lain pihak, kecemasan Hayek akan potensi munculnya *free riders* dalam ekonomi juga layak dipertimbangkan. Secara moral *free riders* tidak dapat dibenarkan. Harus dicegah bahwa orang yang pantas dituntut tanggung jawab sosial justru menyalahgunakan “kebaikan negara” untuk menikmati berbagai *benefits* sosial tanpa bersedia memikul kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai warga negara. Dalam bahasa pasar, hukum pertukaran menuntut bahwa untuk mendapatkan hasil produksi dari yang lain, pelaku pasar harus memproduksi apa yang dibutuhkan pihak lain. Meminjam istilah Rawls, adalah tidak *fair* menuntut hak tanpa bersedia menjalankan kewajiban. Persoalannya tentu saja berbeda ketika tuntutan itu diarahkan kepada individu atau kelompok masyarakat yang memang secara objektif tidak mampu berkontribusi.

Berkaitan dengan hal terakhir di atas Hayek memberikan catatan menarik. Meskipun tidak cukup luas dibahas, Hayek dalam karyanya *The Road to Serfdom*, (1944; diterbitkan kembali 2007), buku yang menggambarkan betapa mudahnya sistem ekonomi terpusat tergelincir ke dalam totalitarianisme, sesungguhnya juga memberi perhatian pada pentingnya peran negara dalam menciptakan *safety net* bagi warga negara yang tidak atau kurang beruntung. Menurutnya, di dalam suatu masyarakat di mana anggota-anggotanya telah mencapai tingkat

²⁴ Polanyi, 2001, hlm.48-58.

kemakmuran tertentu, hal paling utama yang harus diamankan adalah kebebasan umum. Dengan itu Hayek memaksudkan bahwa setiap anggota masyarakat harus dijamin mendapatkan cukup sandang, pangan, dan papan untuk hidup layak. Karena itu, baginya juga tidak ada alasan bahwa negara tidak mendorong sistem sosial yang menjamin warganya terbebas dari bahaya-bahaya yang mengancam hidupnya. Jelas di sini bahwa Hayek tidak seluruhnya buta terhadap nasib dan kesejahteraan kelompok yang kurang atau tidak beruntung.

Kedua, intervensi negara memang harus diterima secara kritis. Selain berpotensi mematikan kreativitas, inisiatif dan inovasi yang merupakan prakondisi peningkatan daya saing dan kemajuan ekonomi, “kepentingan umum” yang diusung sebagai legitimasi berbagai kebijakan publik berpotensi menjadi ideologi yang membenarkan “kekerasan struktural” oleh negara. Menjadi gejala umum bahwa di dalam sebuah negara dengan pemerintahan dan masyarakat yang (sangat) koruptif, “kepentingan umum” tak jarang digunakan sebagai kamufase politik untuk menyelundupkan kepentingan penguasa dan/atau kelompok dominan. Itu juga alasan mengapa teori “kehendak umum” (*general will*) harus disikapi secara kritis. Tanpa sikap ini masyarakat membiarkan negara terjebak dalam totalitarianisme, sebuah kondisi politik yang pasti bertolak belakang dengan nilai-nilai demokrasi yang menjadi karakter peradaban politik modern.

Ketiga, berkaitan erat dengan yang kedua perlu ditegaskan bahwa kalau keadilan sosial dipandang penting maka gerakan ke arah itu harus muncul terutama dari pihak “yang tertindas”. Inisiatif untuk keluar dari kemiskinan atau ketidak-adilan ekonomi harus muncul pertama-tama dan terutama dari pihak yang kurang atau tidak beruntung. Sekali lagi, dalam sebuah pemerintahan dan masyarakat yang koruptif tidak mudah mengharapkan perubahan substansial atas nasib kaum terpinggirkan ke arah yang lebih baik tanpa kelompok itu sendiri berusaha bangkit melawan ketidak-adilan. Revolusi yang kini melanda negara-negara Timur Tengah bisa menjadi contoh betapa perubahan itu menjadi mungkin ketika kaum terpinggirkan mampu mengorganisasi diri menjadi sebuah kekuatan yang tak mudah ditekuk oleh pemerintahan yang paling otoriter sekalipun. Dengan kata lain, penolakan Hayek terhadap intervensi negara bisa menjadi sesuatu yang positif ketika oleh kaum terpinggirkan dilihat sebagai peluang untuk memperjuangkan nasibnya sendiri.

Mengusahakan Keadilan Sosial

Pasar bebas dengan dukungan etos kompetisi telah membuat ekonomi semakin jauh dari posisi dan tujuan asalnya, yakni menciptakan

kesejahteraan bersama. Ekonomi karena itu telah, meminjam istilah Karl Polanyi, tercerabut (*disembedded*) dari kedudukannya di tengah masyarakat sebagai sarana penjaga nilai-nilai sosial serta alat kohesi sosial. Karena itu idealnya ekonomi harus dikembalikan pada posisi asalnya menjadi bagian dari infrastruktur sosial (*embedded*) yang mendorong berkembangnya nilai-nilai sosial demi terciptanya kesejahteraan bersama²⁵. Semangat komunitarian harus dihidupkan kembali, di mana setiap anggota masyarakat melihat dirinya sebagai bagian dari komunitas yang “secara alami terbentuk untuk berkontribusi bagi pemenuhan kebutuhan bersama. ...itulah yang disebut rumah tangga, [karena] anggota-anggotanya hidup dalam semangat saling berbagi demi memenuhi kebutuhan hidup (*meal shares*)”²⁶. Namun di tengah pemujaan individualisme dan kebebasan yang mendasarinya, romantisme moral Polanyi dan Aristoteles barangkali tidak banyak membantu.

Perlu dicatat bahwa Hayek menolak keadilan sosial dijadikan ukuran keberhasilan pasar dengan alasan pasar adalah ordo spontan impersonal yang beroperasi dalam ketidak-pastian. Pasar berada di luar rencana siapapun dan karenanya tidak dapat dan, demi kebebasan, tidak boleh dikontrol siapa pun. Namun perlu dicatat pula bahwa meskipun menolak keadilan sosial, Hayek menegaskan pentingnya peran negara untuk menciptakan *social safety net* bagi kaum yang tidak beruntung. Bahkan dengan masuknya peranan hukum abstrak dalam pasar bebas, Hayek tetap memberi ruang bagi intervensi negara demi menciptakan kesejahteraan bersama. Pertanyaannya, bagaimana keadilan sosial dapat diupayakan tanpa menutup ruang kebebasan individu atau, dalam bahasa Hayek, tanpa mengancam kebebasan umum?

John Rawls menawarkan sebuah jalan untuk itu melalui gagasan *maximin rule* (*maximum minimorum rule*). *Maximin rule* sejatinya merupakan prinsip operasional dari prinsip-prinsip pertama keadilan dalam arti *fairness*, yaitu: (1) prinsip kebebasan yang sebesar-besarnya; dan (2a) prinsip peluang yang sama dan *fair*; serta (2b) prinsip diferens²⁷.

Sebetulnya terdapat kesamaan mendasar antara Hayek dan Rawls. Penekanan keduanya atas prinsip kebebasan sebetulnya berangkat dari asumsi yang sama, yaitu situasi ketidak-pastian (*uncertainty*). Kebebasan (dan hukum abstrak) bagi Hayek penting karena pasar diselimuti ketidak-pastian. Sedangkan bagi Rawls, dalam situasi ketidak-pastian perolehan *benefit* sosial, maka setiap person rasional akan memilih prinsip-prinsip

²⁵ Polanyi, 2001, hlm.48; 1957, hlm. 243-270.

²⁶ Aristotle. *Politics*. Translated by C.D.C. Reeve. United States: Hacket Publishing Company, Inc. 1998, hlm.3.

²⁷ Rawls, 1999, hlm. 47-101; 130-138.

keadilan yang menjamin kebebasan serta hak-hak dasarnya. Bahkan bagi Rawls kebebasan begitu penting sehingga tidak boleh digadaikan untuk kepentingan apapun di luarnya termasuk untuk kepentingan ekonomi. Itu sebabnya, prinsip-prinsip keadilan, menurutnya, harus diletakan dalam sebuah tatanan leksikal; maksudnya, prinsip keadilan (2) baru boleh dilaksanakan apabila prinsip keadilan (1) sudah terwujud. Demikian juga prinsip keadilan (2b) baru boleh dilaksanakan apabila prinsip keadilan (2a) sudah terpenuhi. Pengaturan seperti itu penting karena masing-masing prinsip memuat hak-hak dasar yang tidak bisa dipertukarkan.

Prinsip dasarnya, sebelum hak-hak dasar (baca: kebutuhan dasar) setiap orang terpenuhi, pihak mana pun tidak dibenarkan mengejar keuntungan yang mengakibatkan mereka yang kurang atau tidak beruntung menjadi semakin menderita. Itu sebabnya Rawls menekankan pentingnya *maximin rule* atau *maximin strategy* dalam kebijakan publik. Inilah strategi di mana nasib dari kelompok yang kurang beruntung dijadikan *benchmark* kebijakan publik (prinsip 2a: *peluang yang sama dan fair*) demi menjamin terpenuhinya hak-hak dasar setiap orang. Tetapi pada saat yang sama Rawls juga tidak ingin menutup peluang lebih besar bagi mereka yang memang secara objektif pantas mendapatkan lebih (prinsip 2b: *prinsip diferens*). Dengan catatan, kelebihan yang didapatkan oleh mereka yang beruntung harus memberi manfaat juga bagi mereka yang kurang atau tidak beruntung. Dengan demikian, peningkatan kesejahteraan kelompok yang beruntung juga mendorong peningkatan kesejahteraan dari kelompok yang kurang beruntung. Dengan pendekatan ini, Rawls, di satu sisi, berusaha mengamankan hak-hak dasar setiap orang, namun, di sisi lain, tetap memberi ruang kebebasan kepada mereka yang lebih beruntung untuk mengejar kepentingannya. Dengan kata lain, kebijakan ekonomi berbasis *maximin rule* membuka peluang bagi mereka yang kurang beruntung untuk memperoleh kesejahteraan tanpa melanggar kebebasan dari kelompok yang lebih beruntung.

Kesimpulan dan Penutup

Pembelaan Hayek atas sistem ekonomi pasar bebas menyadarkan kita akan pentingnya pembelaan atas hak-hak dasar manusia, khususnya hak ekonomi. Kemajuan ekonomi mengandaikan pentingnya ruang kreativitas dan inovasi. Karena itu kebebasan sebagai prakondisi kreativitas dan inovasi menjadi sentral dalam membangun peradaban manusia, khususnya dalam sistem ekonomi pasar.

Meskipun begitu, kesimpulan Hayek bahwa keadilan sosial tidak punya tempat dalam sistem ekonomi pasar bebas, persis karena tuntutan

keadilan sosial justru membahayakan kebebasan dan peradaban manusia, pasti berlebihan. Kesimpulan Hayek sesungguhnya berangkat dari asumsi bahwa pasar memang beroperasi secara spontan dan independen. Namun tidak ada cukup bukti bahwa pasar sepenuhnya lepas dari intervensi siapa pun juga, termasuk intervensi para pelaku pasar. Pasar bahkan selalu bisa terdistorsi oleh kepentingan-kepetingan egoistis pelaku pasar. Itu berarti sistem ekonomi pasar bebas dapat selalu menjadi ancaman bagi keadilan sosial yang merupakan ideal masyarakat beradab. Karena itu intervensi negara terhadap pasar menjadi penting dan harus dilakukan terutama ketika keadilan sosial atau keadilan ekonomi terancam.

Keadilan sosial memang tidak mudah dicapai atau diwujudkan tetapi ia bukan sebuah utopia dalam arti radikal. Keadilan sosial selalu bisa didekati, kalau tidak bisa diwujudkan sepenuhnya, asalkan nasib dan kualitas hidup kelompok masyarakat yang paling tidak beruntung (*the worst off*) dijadikan dasar dalam merencanakan dan menerapkan pelbagai kebijakan ekonomi.

Sebuah masyarakat beradab tidak akan atas nama kebebasan membiarkan berlakunya sebuah sistem ekonomi yang jelas-jelas berpotensi memperlebar jurang ketidak-adilan sosial. Keberadaban menuntut bahwa kebebasan, betapa pun pentingnya, juga harus diatur sehingga pelaksanaannya tidak berbalik menjadi ancaman terhadap hak-hak dasar manusia. Di sini peran negara menjadi sangat sentral persis karena negara memiliki kewajiban moral dan legal untuk menjamin hak-hak dasar, termasuk hak ekonomi, bagi segenap warga negara.

Daftar Rujukan

- Aristotle. *Politics*. Translated by C.D.C. Reeve. United States: Hackett Publishing Company, Inc, 1998.
- Boatright, R. *Ethics and The Conduct of Business*. Foruth Edition. New Jersey: Pearson Education, Inc., 2003.
- Bremmer, Ian. *The End of The Free Market. Who Wins the War Between States and Corporation?*. New York: Penguin Group (USA) Inc, 2010.
- Gates, Bill. "A New Approach to Capitalism. Dalam Kinsley, Michael, (ed). *Creative Capitalism*. New York: Simon & Schuter.2008.
- Hayek, Friedrich August. *Law, Legislation and Liberty: The Mirage of Social Justice*. Chicago, London: The University of Chicag Press, 1978.
- . *The Road to Serfdom*. Chicago: The University of Chicago Press, 2007.
- Kant, Immanuel. *The Metaphysical Elemetns of Justice*. Translated with an

- introduction by John Ladd. Indianapolis, New York: The Bobbs-Merrill Company Inc. 1965.
- Nozick, Robert. *Anarchy, State, and Utopia*. Oxford: Basic book, Inc. 1974.
- Polanyi, Karl. *The Great Transformation. The Political and Economic Origins of Our Time*. Foreward by Joseph E. Stiglitz. Introduction by Fred block. Boston: Beacon Press, 2001.
- . "Aristotle Discovers The Economy". Dalam Polanyi, Karl, et al., (eds.). *Trade and Market in The Early Empires, Economies in History and Theory*. New York: The Free Press. 1957
- Rawls, John. *A Theory of Justice*. Revised Edition. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 1999.
- . *Justice as Fairness: A Restatement*. Edited by Erin Kelly. Cambridge, Masscusetts, Lonodon: Belknap Press of Harvard University Press, 2001.
- Sen, Amartya. Judul asli: *Ethics and Economics*. Diindonesiakan oleh Rahmani Astuti: *Masih Adakah Harapan Bagi Kaum Miskin*. Badung: Mizan, 1988.

